



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RDP/U PANJA PEMULIHAN PARIWISATA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Reses ke-	: IV (Keempat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: RDP/RDPU (Fisik dan Virtual)
Dengan	: 1. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf RI 2. Deputi Bidang Destinasi dan Infra Struktur Kemenparekraf/ Baparekraf RI 3. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI 4. Pemerintah Daerah Provinsi NTB 5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 6. Pemerintah Daerah Provinsi NTT 7. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 8. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 9. Badan Otorita Danau Toba 10. Badan Otorita Borobudur 11. Badan Otorita Labuan Bajo 12. Badan Otorita Likupang 13. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ <i>Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Mandalika</i>
Hari/Tanggal	: Senin, 29 Juni 2020.
Pukul	: 14.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI dan Virtual menggunakan Zoom
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP/Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Konsep Kesiapan dan kebijakan pemerintah (Kemenparekraf/Baparekraf RI) dalam Pengembangan Pariwisata di masa <i>New Normal</i> ; 2. Kebijakan Pemda dalam rangka pemulihan pariwisata memasuki masa <i>New Normal</i> ;

3. Pandangan dan masukan Badan Otorita/Lembaga Pengelola Pariwisata dalam pemulihan pariwisata pada masa New Normal dan Paska Pandemi Covid-19.
- Hadir Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI : 21 orang dari 29 Panitia Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI.
- Hadir Narasumber (Fisik) :
1. **R Kurleni Ukar** (Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf RI)
 2. **Hari Santosa Sungkari** (Deputi Bidang Destinasi dan Infra Struktur Kemenparekraf/Baparekraf RI)
 3. **Rizki Handayani** (Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI)
 4. **Lalu Mohammad Faozal** (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB)
 5. **Abdulbar M Mansoer** (Dirut PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia *Tourism Development Corporation-ITDC*) Mandalika
- Hadir Narasumber (Virtual)
6. **Ganjar Pranowo, SH.,M.IP** (Gubernur Provinsi Jawa Tengah)
 7. **Letjen TNI Edy Rahmayadi** (Gubernur Provinsi Sumatera Utara)
 8. **Josep A. Noesoe** (Wakil Gubernur Provinsi NTT)
 9. **Praseno Hadi, AK.,MM** (Asda 2 Pemda Provinsi Sulawesi Utara)
 10. **Arie Prasetyo** (Dirut BOP Danau Toba)
 11. **Indah Juanita** (Dirut BOP Borobudur)
 12. **Shana Fatina** (Dirut BOP Labuan Bajo)
 13. **Paquita Widjaja Rustandi** (Dirut PT. Minahasa Permai Resort Development)/Pengelola Destinasi Likupang

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.04 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP/Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang tata tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari eselon I Kemenparekraf/Baparekraf RI, Gubernur Jateng, Gubernur Sumut, Gubernur Sulut, Gubernur NTT, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan 5 (lima) Badan Otorita/Pengelola Destinasi Pariwisata Superprioritas serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

1. Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI, Gubernur Jateng, Gubernur Sumut, Asda 2 Pemda Provinsi Sulut, Wakil Gubernur NTT, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan 5 (lima) Badan Otorita/Pengelola Destinasi Pariwisata Superprioritas yang telah menyampaikan penjelasan, pandangan dan masukan mengenai pemulihan pariwisata, yang substansi dan datanya akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan laporan/rekomendasi Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI.
2. Terhadap penjelasan, pandangan dan masukan yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI, Gubernur Jateng, Gubernur Sumut, Asda 2 Pemprov Sulut, Wakil Gubernur NTT, Kepala Dinas Pariwisata NTB, dan 5 (lima) Badan Otorita/Pengelola Destinasi Pariwisata Superprioritas, Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
 - a. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI, Pemda dan Badan Otorita/Pengelola Destinasi Pariwisata Superprioritas untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan organisasi atau pelaku parekraf serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata lainnya dalam upaya percepatan pemulihan pariwisata.
 - b. Selain adanya *Task Force* penanganan Covid-19, Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membuat Gugus Tugas Manajemen Pemulihan Pariwisata guna menjembatani permasalahan dan mengakselerasi pemulihan pariwisata di masa pandemi dan paska pandemi Covid-19.
 - c. Mendorong Pemda dan Badan Otorita/Pengelola Destinasi Pariwisata Superprioritas, melakukan langkah-langkah inovatif dalam membuka destinasi pariwisata dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, dan buku panduan teknis pariwisata yang akan diterbitkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI.
 - d. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menyelesaikan buku panduan teknis pariwisata dan melakukan sosialisasi secara cepat dan masif dengan melibatkan pemangku kepentingan pariwisata, dan menggunakan berbagai media sosialisasi.
 - e. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan yang terukur dan realistis dalam upaya pembukaan destinasi pariwisata sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
 - f. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI dan Pemerintah Daerah menjadikan isu-isu lingkungan sebagai rujukan dalam pengelolaan destinasi pariwisata agar pengembangan dan pemulihan pariwisata dapat berkelanjutan.

- g. Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI mencatat hal-hal mendesak dan krusial untuk segera ditindaklanjuti, antara lain; keringanan biaya listrik dan pajak bagi pelaku Parekraf dan UMKM, bantuan biaya pelaku parekraf dan UMKM untuk memulai kembali usahanya, sosialisasi panduan wisata di masa New Normal secara cepat dan masif, kemudahan kredit dari lembaga keuangan, penyediaan sarpras pendukung Protokol kesehatan Covid-19.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.01 WIB

KETUA RAPAT, 



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP